

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 11, December 2025, P. 75-81
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17846931>

Akuntabilitas dan Pengawasan BK, Masalah dan Solusinya

Accountability and Supervision in Guidance and Counseling: Issues and Solutions

Yona Apriliana¹, Neviyarni², Yarmis Syukur³

Universitas Negeri Padang

*Corresponding Email: yonaapriliana@student.unp.ac.id

Abstract

Akuntabilitas dan pengawasan merupakan dua aspek penting dalam penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah. Keduanya berfungsi untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan BK terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar profesional. Penelitian dan kajian literatur menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam BK mencakup tanggung jawab konselor terhadap pelaksanaan program, penggunaan sumber daya, serta hasil layanan yang diberikan kepada peserta didik dan pemangku kepentingan. Sementara itu, pengawasan memiliki peran sebagai mekanisme kontrol dan pembinaan yang memastikan pelaksanaan layanan sesuai dengan kode etik dan tujuan pendidikan. Namun, pelaksanaan akuntabilitas dan pengawasan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas, kurangnya supervisi yang terstruktur, dan keterbatasan fasilitas pendukung. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan kompetensi konselor, peningkatan sistem monitoring berbasis data, serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan pengawasan secara konsisten, layanan BK di sekolah dapat lebih transparan, profesional, dan berdampak positif terhadap perkembangan peserta didik.

Kata kunci: *Akuntabilitas, Pengawasan, Bimbingan dan Konseling, Manajemen BK, Profesionalisme Konselor*

Abstract

Accountability and supervision are two essential aspects in the implementation of Guidance and Counseling (GC) services in schools. Both function to ensure that all GC activities are carried out effectively, efficiently, and in accordance with professional standards. Research and literature indicate that accountability in GC includes counselors' responsibility for program implementation, the use of resources, and the outcomes of services provided to students and stakeholders. Meanwhile, supervision serves as a control and developmental mechanism that ensures the delivery of services aligns with ethical codes and educational goals. However, the implementation of accountability and supervision in the field still faces various challenges, such as low awareness of their importance, lack of structured supervision, and limited supporting facilities. To address these issues, it is necessary to strengthen counselors' competencies, improve data-based monitoring systems, and enhance sustainable institutional support. By consistently applying the principles of accountability and supervision, GC services in schools can become more transparent, professional, and positively impactful on students' development.

Keywords: *Accountability, Supervision, Guidance and Counseling, GC Management, Counselor Professionalism*

Article Info

Received date: 25 November 2025

Revised date: 02 December 2025

Accepted date: 05 December 2025

PENDAHULUAN

Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang berperan penting dalam membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal, baik secara pribadi, sosial, belajar, maupun karier. Agar layanan BK berjalan efektif, diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks inilah, konsep akuntabilitas dan pengawasan menjadi unsur yang sangat penting untuk menjamin mutu, kredibilitas, serta keberlanjutan layanan BK di sekolah.

Akuntabilitas dalam BK mencerminkan tanggung jawab konselor terhadap pelaksanaan program dan hasil layanan yang diberikan kepada peserta didik serta pihak-pihak terkait, seperti kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Menurut Yusuf (2002), akuntabilitas BK mencakup pertanggungjawaban terhadap proses dan hasil kegiatan, baik dalam aspek manajerial, program, maupun pelayanan konseling. Dengan demikian, setiap kegiatan BK harus memiliki dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terukur serta dapat dievaluasi secara objektif.

Sementara itu, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan BK dilaksanakan sesuai dengan standar, kode etik, dan tujuan pendidikan. Pengawasan juga membantu meningkatkan profesionalisme konselor melalui supervisi, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut terhadap hasil layanan. Seperti dinyatakan oleh Gysbers dan Henderson (2012), pengawasan yang efektif dalam layanan konseling sekolah tidak hanya menilai kinerja konselor, tetapi juga membangun sistem perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas layanan.

Dengan menerapkan akuntabilitas dan pengawasan secara optimal, diharapkan layanan BK di sekolah dapat memberikan dampak nyata terhadap perkembangan peserta didik dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang konsep, permasalahan, serta solusi strategis dalam penerapan akuntabilitas dan pengawasan BK di lingkungan sekolah.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beragam informasi dan data yang bersumber dari materi pustaka, baik berupa dokumen, buku, majalah, karya sejarah, maupun sumber daring seperti artikel dan *online book*. Menurut Syaodih (2009), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengandalkan berbagai informasi yang diperoleh melalui bahan pustaka, seperti buku dan jurnal ilmiah. Artikel bertujuan untuk mengkaji secara kritis pengetahuan, gagasan, serta temuan-temuan yang termuat dalam literatur akademik, sehingga dapat memberikan landasan teoritis yang kuat terhadap materi akuntabilitas dan pengawasan bk, masalah dan solusinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Akuntabilitas dan Pengawasan

Akuntabilitas dalam Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan tanggung jawab profesional konselor untuk menunjukkan bahwa layanan yang diberikan benar-benar bermanfaat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Akuntabilitas menekankan pentingnya konselor dalam melaporkan, mendokumentasikan, serta mengevaluasi hasil layanan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada peserta didik, sekolah, dan masyarakat.

Menurut Gysbers dan Henderson (2012), "*Accountability in school counseling means demonstrating the effectiveness of guidance and counseling programs through data-based evidence of student improvement.*" Artinya, akuntabilitas dalam BK menuntut konselor untuk menunjukkan efektivitas layanan melalui bukti nyata berupa data hasil perkembangan peserta didik. Dengan adanya akuntabilitas, layanan BK menjadi lebih transparan, terukur, dan dipercaya oleh berbagai pihak.

Lebih lanjut, Prayitno (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam BK mencakup kemampuan konselor untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses layanan — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi — agar sesuai dengan standar etika profesi dan tujuan pendidikan. Hal ini berarti konselor tidak hanya bertanggung jawab atas hasil, tetapi juga atas kualitas proses dan integritas profesional yang dijalankan.

Pengawasan (supervisi) dalam BK adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa layanan bimbingan dan konseling terlaksana sesuai standar, prinsip, dan kode etik profesi. Tujuan utama pengawasan adalah untuk meningkatkan kualitas layanan serta mengembangkan kompetensi profesional konselor secara berkelanjutan.

Menurut Borders dan Brown (2005), "*Supervision in counseling is a process of guidance and evaluation provided by a more experienced counselor to ensure the quality and ethical standards of counseling practice.*" Pernyataan ini menegaskan bahwa pengawasan merupakan bentuk bimbingan dan penilaian yang dilakukan oleh konselor senior atau pengawas agar layanan konseling tetap berada pada jalur profesional dan etis.

Senada dengan itu, Prayitno (2012) menyebut bahwa pengawasan dalam BK berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan layanan dilakukan sesuai rencana, prosedur, dan tujuan pendidikan, serta menjadi sarana pembinaan konselor agar terus meningkatkan kemampuannya. Pengawasan bukan hanya kontrol administratif, tetapi juga proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan mutu layanan.

Dengan demikian, pengawasan berperan untuk menjamin mutu pelaksanaan program BK sekaligus mendorong pertumbuhan profesional konselor agar tetap konsisten dalam memberikan layanan yang berkualitas, akuntabel, dan beretika.

B. Stakeholder (Pelanggan) BK

Istilah stakeholders atau pemangku kepentingan telah menjadi istilah yang sangat umum dan sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu, seperti manajemen bisnis, komunikasi, pengelolaan sumber daya alam, serta sosiologi. Banyak lembaga publik maupun swasta menggunakan istilah ini dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Secara sederhana, stakeholder dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan, keterlibatan, atau pengaruh terhadap suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Dalam konteks layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2004) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan layanan BK meliputi:

1. Peserta didik,
2. Orang tua peserta didik,
3. Personel sekolah,
4. Masyarakat, termasuk organisasi profesi seperti ABKIN, dan
5. Pemerintah.

Lebih lanjut, Prayitno dan Erman Amti (2009) menegaskan bahwa seorang konselor profesional yang berkomitmen harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap lima pihak utama, yaitu:

1. Diri sendiri, sebagai bentuk tanggung jawab pribadi untuk melaksanakan tugas secara profesional dan etis.
2. Ilmu dan profesi, dengan menjunjung tinggi prinsip keilmuan serta kode etik profesi bimbingan dan konseling.
3. Peserta didik atau sasaran layanan, melalui pemberian bantuan yang bermanfaat bagi pengembangan potensi diri dan penyelesaian masalah.
4. Pemangku kepentingan lainnya, seperti orang tua, pimpinan sekolah, dan lembaga pendidikan, dengan menjalankan kewajiban sesuai peran yang dipercayakan kepadanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan layanan BK tidak hanya bergantung pada konselor sebagai pelaksana utama, tetapi juga pada keterlibatan aktif para stakeholders yang mendukung tercapainya tujuan pengembangan peserta didik secara menyeluruh.

C. Syarat Akuntabilitas dan Pengawasan

Menurut Yusuf (2002), suatu organisasi dapat dikatakan akuntabel apabila pelaksanaan kegiatannya memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, organisasi harus mampu menetapkan tujuan yang jelas dan relevan. Kedua, organisasi perlu mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, organisasi harus mendorong penerapan standar tersebut secara efektif dalam pelaksanaan kegiatan. Terakhir, organisasi perlu memastikan bahwa setiap standar dan kegiatan operasional dijalankan dengan efektif, ekonomis, dan efisien.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan sistem pengawasan yang baik, Yusuf juga menekankan pentingnya dua unsur utama. Pertama adalah kemampuan untuk memberikan jawaban atau pertanggungjawaban (responsibilitas). Dalam konteks bimbingan dan konseling, hal ini berarti konselor atau guru BK perlu memberikan laporan secara berkala serta siap menjawab pertanyaan atau evaluasi terkait pelaksanaan layanan yang mereka lakukan.

Kedua adalah konsekuensi terhadap keterbukaan informasi, di mana masyarakat atau klien berhak mengetahui kebijakan yang diambil oleh konselor, termasuk program layanan yang dijalankan, metode asesmen yang digunakan, hasil penilaian, penggunaan data, serta tindak lanjut layanan yang diberikan. Kedua prinsip ini merupakan landasan utama dalam membangun kepercayaan publik (public trust) terhadap profesi konselor dan layanan bimbingan konseling di sekolah.

D. Bentuk-bentuk Akuntabilitas

Menurut Yusuf (2002), terdapat beberapa bentuk akuntabilitas yang perlu diterapkan dalam layanan Bimbingan dan Konseling (BK) agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan.

1. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas hasil dari seluruh kegiatan BK yang telah dilaksanakan. Pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana program yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, bentuk akuntabilitas ini juga mencakup proses pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat menunjukkan sejauh mana kegiatan BK dijalankan secara efektif dan sesuai tujuan.

2. Akuntabilitas Manajemen

Akuntabilitas ini menekankan pada penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif, baik itu dana, fasilitas, maupun tenaga kerja. Dalam hal ini, peran manajer bukan hanya memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, tetapi juga mengembangkan proses kerja yang berkelanjutan agar layanan BK dapat diberikan secara optimal.

Lebih lanjut, Yusuf juga menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam BK dapat dilihat dari dua sisi, yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal.

1. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas internal mengacu pada tanggung jawab yang harus dipenuhi di dalam struktur organisasi. Setiap individu atau petugas wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasan langsung atau pihak yang berwenang. Dalam konteks sekolah, misalnya, guru BK atau konselor bertanggung jawab kepada kepala sekolah atas pelaksanaan tugas dan program yang dijalankan.

2. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas eksternal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak di luar organisasi yang menerima manfaat dari layanan BK. Contohnya, konselor sekolah harus dapat mempertanggungjawabkan kualitas layanan kepada masyarakat atau pengguna jasa konseling sebagai bentuk transparansi dan menjaga kepercayaan publik.

E. Kriteria Akuntabilitas

Agar sistem akuntabilitas dalam layanan bimbingan menghasilkan manfaat yang diharapkan, Krumboltz (dalam Munandir, 1996) mengusulkan tujuh hal penting, yaitu:

1. Tanggung jawab dan tujuan layanan perlu jelas. Konselor dan semua pihak terkait harus sepakat mengenai apa saja tugas konselor serta tujuan umum dari proses konseling.
2. Hasil layanan harus terlihat pada perubahan perilaku klien. Apa yang dilakukan konselor dan hasil yang dicapai perlu dinyatakan melalui perubahan sikap atau perilaku klien yang dapat diamati.
3. Kegiatan konselor dipandang sebagai investasi biaya. Apa yang dilakukan konselor sebaiknya diperlakukan sebagai pengeluaran biaya, bukan sekadar pekerjaan, sehingga manfaat dan hasilnya dapat dinilai.
4. Akuntabilitas bertujuan meningkatkan kualitas kerja. Sistem ini dibuat untuk membantu konselor menjadi lebih efektif dan berkembang, bukan untuk menyalahkan atau menghukum ketika terjadi kekurangan.
5. Laporan harus jujur dan apa adanya. Konselor tidak boleh dilarang melaporkan kegagalan atau hasil yang belum diketahui, karena kejujuran membantu perbaikan layanan.
6. Semua pihak yang menggunakan layanan perlu dilibatkan. Setiap pihak yang akan memakai atau terdampak oleh sistem akuntabilitas harus ikut berkontribusi dalam penyusunannya.
7. Sistem akuntabilitas harus bisa ditinjau ulang. Sistem yang dibuat perlu dievaluasi secara berkala dan dapat diubah apabila diperlukan untuk meningkatkan mutu layanan.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan BK

Pelaksanaan akuntabilitas dalam layanan Bimbingan dan Konseling (BK) sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Menurut Yusuf (2002), faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

1. Faktor Pendukung Akuntabilitas

Beberapa hal yang dapat memperkuat pelaksanaan akuntabilitas BK antara lain:

- a. Adanya kepemimpinan yang mampu memberi teladan positif bagi seluruh anggota organisasi.
- b. Dilaksanakannya diskusi yang mendalam mengenai program BK, sehingga tujuan dan indikator kinerja dapat ditentukan dengan jelas.
- c. Terjalinnnya koordinasi yang baik, baik antar individu maupun antar unit kerja terkait.

- d. Tersusunnya standar kerja yang jelas dan terukur sebagai acuan pelaksanaan.
 - e. Terciptanya komunikasi yang terbuka mengenai tujuan dan makna akuntabilitas kepada seluruh pihak yang terlibat.
2. Faktor Penghambat Akuntabilitas
- Di sisi lain, terdapat pula sejumlah faktor yang dapat menghambat tercapainya akuntabilitas BK secara optimal, antara lain:
- a. Rendahnya kesadaran dan komitmen terhadap akuntabilitas.
 - b. Kurangnya kemauan untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pekerjaan.
 - c. Menurunnya nilai dan norma etika kerja.
 - d. Budaya kerja negatif, seperti kebiasaan malas atau kurang disiplin.
 - e. Kualitas tenaga pelaksana yang rendah, baik dari segi kompetensi maupun profesionalisme.
 - f. Krisis lingkungan kerja yang tidak kondusif bagi pelaksanaan akuntabilitas.
 - g. Lemahnya regulasi atau hukum yang mengatur tentang akuntabilitas.
 - h. Keterbatasan teknologi yang sudah usang dan tidak mendukung sistem kerja modern.
 - i. Rendahnya standar hidup masyarakat, yang dapat memengaruhi sikap terhadap tanggung jawab dan etos kerja.

G. Implikasi Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pengawasan

Pelaksanaan akuntabilitas dalam layanan Bimbingan dan Konseling (BK) dapat berjalan dengan baik apabila berbagai faktor penghambat dapat diminimalkan sejak awal, sementara faktor pendukung dapat diterapkan secara konsisten. Akuntabilitas dalam BK mencakup pertanggungjawaban terhadap hasil layanan, proses pelaksanaan, serta program pengawasan menyeluruh atas kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan di sekolah. Pertanggungjawaban ini disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu siswa, orang tua, tenaga pendidik, masyarakat, serta pihak pemerintah.

Pelaksanaan akuntabilitas yang baik memberikan dampak positif bagi konselor maupun lembaga tempatnya bekerja. Dampak tersebut dapat terlihat dari sistem organisasi dan manajemen sekolah yang semakin sehat, transparan, dan kompetitif. Akuntabilitas juga menegaskan bahwa seorang konselor wajib mampu mempertanggungjawabkan seluruh dokumen dan kegiatan layanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Gibson dan Mitchell (1981) menambahkan bahwa dengan menerapkan akuntabilitas, konselor dapat memahami cara memberikan bantuan yang lebih efektif dan efisien kepada klien. Penerapan akuntabilitas juga membawa sejumlah manfaat bagi konselor, di antaranya:

1. Meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah berdasarkan kompetensi profesional yang diakui oleh penerima layanan.
2. Mendorong peningkatan dukungan finansial terhadap kegiatan bimbingan dan konseling.
3. Memperkuat hubungan kerja sama antarprofesi, khususnya dalam bidang pendidikan dan psikologi.
4. Menumbuhkan pengakuan terhadap posisi dan profesionalisme konselor di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
5. Meningkatkan kepuasan dan penghargaan terhadap kualitas layanan, yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan terhadap program maupun pelaksanaannya.

H. Masalah dan Solusi

Berdasarkan sejumlah penelitian, terdapat beberapa hambatan nyata dalam pelaksanaan akuntabilitas dan pengawasan di layanan BK:

1. Dalam penelitian yang mengembangkan instrumen akuntabilitas bagi guru BK, ditemukan bahwa konselor sekolah masih menghadapi berbagai kendala, seperti “kekhawatiran konselor dengan data intervensi yang tidak efektif, kurangnya waktu dan minat, kurangnya kepercayaan diri ..., sulitnya mengukur hasil konseling sekolah, kurangnya sumber daya keuangan dan manusia, kurangnya kejelasan tentang kriteria untuk mengukur” (Fatimah, 2019).
2. Studi di sekolah menengah di Jakarta menunjukkan bahwa “tingkat akuntabilitas program BK secara keseluruhan berada di level rendah (49%) pada indikator umpan balik (feedback mechanism) adalah yang terendah” (Badrujaman, Luawo & Cahyawulan, 2018).

3. Penelitian literatur menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam BK sering masih bersifat administratif dan belum berbasis bukti, dengan guru BK “masih terbatas” dalam dokumentasi dan pelaporan yang sistematis (Putri, 2025).
4. Terkait pengawasan, penelitian menunjukkan bahwa supervisi terhadap guru pembimbing dan konselor sering dilakukan secara umum dan belum optimal dalam meningkatkan kualitas layanan: “the way the supervisor supervised ... still in general, implementation has not yet been optimum” (Hestiningtyan, Sugiyo & Awalya, 2022).

Dari ringkasan di atas, kita dapat mengidentifikasi masalah utama sebagai berikut:

1. Kurangnya standar, indikator, dan mekanisme umpan balik yang jelas untuk akuntabilitas BK.
2. Keterbatasan sumber daya (waktu, SDM, fasilitas) yang menyulitkan pengumpulan data dan evaluasi layanan.
3. Pengawasan dan supervisi yang belum sistematis dan belum terintegrasi secara profesional dalam manajemen BK.
4. Rendahnya pemahaman dan kesiapan guru BK dalam menerapkan akuntabilitas berbasis data dan bukti.

Berbagai penelitian juga menawarkan strategi atau solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas:

1. Dalam studi literatur mengenai akuntabilitas layanan BK, disebut bahwa perlu ada pelatihan, integrasi sistem digital dokumentasi, dan penguatan regulasi sebagai struktur pendukung akuntabilitas yang lebih reflektif dan kolaboratif. Misalnya: “structural interventions such as training, integration of digital documentation systems, and strengthening of regulations are needed to encourage more reflective and collaborative accountability” (Putri, 2025).
2. Penelitian “Analisis Akuntabilitas dan Pengawasan serta Solusi untuk Masalah BK” memberikan rekomendasi bahwa pengembangan manajemen BK harus mencakup mekanisme pengawasan yang kuat dan sistem dokumentasi yang mendukung peran konselor sebagai profesional yang akuntabel.
3. Studi “Mengoptimalkan Akuntabilitas dalam Manajemen BK” menemukan bahwa solusi meliputi: pengembangan standar akuntabilitas yang jelas, peningkatan kapasitas profesional, dan integrasi teknologi dalam pengawasan layanan BK. Contohnya: “penelitian ini merekomendasikan ... pengembangan standar akuntabilitas yang jelas, peningkatan kapasitas tenaga profesional, dan integrasi teknologi dalam proses pengawasan dan evaluasi” (Fitri, Firman & Yarni, 2024).
4. Pengembangan instrumen skala akuntabilitas juga menunjukkan bahwa memiliki alat ukur yang valid dan reliabel sangat penting untuk memfasilitasi akuntabilitas: “school counselling accountability has transformed from simply counting counselor activity to being data and evidence-based to demonstrate impact on student success” (Isrofin, Taufiq, Ahman, Yustiana & Septiana, 2024).

SIMPULAN

Akuntabilitas dan pengawasan dalam layanan Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan dua komponen kunci yang memastikan bahwa seluruh kegiatan konseling berjalan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata. Akuntabilitas menuntut konselor untuk mampu mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil layanan melalui bukti data yang valid, sementara pengawasan berfungsi untuk menjamin bahwa pelaksanaan program BK sesuai dengan standar etika, prinsip ilmiah, dan tujuan pendidikan.

Keberhasilan penerapan akuntabilitas sangat bergantung pada dukungan kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang baik, komunikasi terbuka, serta tersedianya standar kerja yang jelas. Sebaliknya, rendahnya kesadaran terhadap akuntabilitas, lemahnya regulasi, keterbatasan sumber daya, dan budaya kerja yang kurang disiplin menjadi faktor penghambat utama. Pengawasan yang efektif diperlukan agar konselor tidak hanya dikontrol secara administratif, tetapi juga dibina secara profesional untuk terus mengembangkan kompetensinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dan pengawasan di sekolah masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya instrumen evaluasi yang terstandar, keterbatasan waktu dan sumber daya, serta pengawasan yang belum optimal (Fatimah, 2019; Badrujuman, Luawo, & Cahyawulan, 2018; Hestiningtyan, Sugiyo, & Awalya, 2022). Untuk mengatasi

hal tersebut, berbagai studi merekomendasikan strategi penguatan manajemen BK melalui pelatihan profesional, penggunaan sistem dokumentasi digital, penyusunan standar akuntabilitas yang terukur, dan integrasi teknologi dalam supervisi layanan (Putri, 2025; Fitrhi, Firman, & Yarni, 2024; Isrofin et al., 2024).

REFERENSI

- Badrujaman, A., Luawo, M. I. R., & Cahyawulan, W. (2018). *Accountability of layanan dasar by school counselor in junior high school in East Jakarta on school principals perspective*. *Konselor*, 7(4), 145–150. <https://doi.org/10.24036/020187410740-0-00>
- Borders, L. D., & Brown, L. L. (2005). *The new handbook of counseling supervision*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Fatimah, S. (2019). *Asesmen akuntabilitas kinerja konselor: Ditinjau dari segi permasalahan dan model pelaksanaannya*. *QUANTA Journal: Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 4(2), 77–86.
- Fitrhi, T. W., Firman, F., & Yarni, N. (2024). *Mengoptimalkan akuntabilitas dalam manajemen bimbingan dan konseling: Tantangan, analisis, dan solusi*. *Journal of Educational Management and Strategy*, 3(1), 10–16. <https://doi.org/10.57255/jemast.v3i01.321>
- Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2012). *Developing and managing your school guidance and counseling program* (5th ed.). Alexandria, VA: American Counseling Association.
- Hestiningtyan, A. P., Sugiyo, & Awalya, A. (2022). *The implementation of school counseling supervision to improve the school counselor performance*. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 11(1). <https://doi.org/10.15294/jubk.v11i1.55768>
- Isrofin, B., Taufiq, A., Ahman, A., Yustiana, Y. R., & Septiana, N. Z. (2024). *Initial validation of a school counselor accountability scale (ID-SCAS) using the Rasch model*. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 13(1), 70–84.
- Prayitno. (2012). *Layanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah*. Padang: UNP Press.
- Prayitno. (2017). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putri, P. (2025). *Accountability in guidance and counseling services in Madrasah: Challenges and urgency*. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(4), 451–460.
- Yusuf, A.M. (2002). *Seminar Sehari Akuntabilitas Pelayanan Bimbingan dan Konseling*. Padang: Jurusan BK FIP. UNP.